



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUTON TENGAH**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUTON TENGAH  
NOMOR 12 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH  
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENGAH  
TAHUN 2025**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENGAH,**

- Menimbang
- : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata Kelola dan birokrasi Kementerian negara/Lembaga/instansi pemerintah, diperlukan pelaksanaan reformasi yang transparan, akuntabel, bersih, bertanggung jawab dan berkelanjutan melalui Upaya Pembangunan dan penegakan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
  - b. bahwa untuk melaksanakan Pembangunan dan Penegakan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Buton Tengah berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2024, perlu membentuk Tim yang berperan sebagai teladan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Penegakan integritas, pelayanan yang berkualitas, dan pencegahan terhadap korupsi, kolusi dan nepotisme;.
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah Tahun 2025;.



Mengingat

- : 1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah di ubah dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2027 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);



8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategis Nasional Pencegahan Korupsi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 145);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020–2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441), sebagaimana telah di ubah dengan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), Sebagaimana beberapa kali diubah terakhir Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571), sebagaiman telah di ubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan



- Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1393 Tahun 2023 Tentang Road dan Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilhan Umum Tahun 2020–2024;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENGAH TAHUN 2025

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah Tahun 2025, yang terdiri atas :

- I. Tim Pengarah
- II. Tim Pelaksana, Meliputi :
  - A. Tim Manajemen Perubahan;
  - B. Tim Penataan tata laksana;
  - C. Tim Penataan Sistem manajemen SDM;
  - D. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
  - E. Tim Penguatan Pengawasan ;
  - F. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

KEDUA : Uraian tugas-tugas Tim Pembangunan Zona Integritas sebagaimana di maksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut :

- I. Tim Pengarah
  - 1. Memberikan arahan dan petunjuk tentang prioritas kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM;
  - 2. Memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja untuk masing-masing TIM;
  - 3. Memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi KPU RI dan berdampak dalam perbaikan birokrasi, peningkatan kualitas pelayanan public, dan bagi Masyarakat;
  - 4. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM;
  - 5. Menjaga konsistensi arah, sasaran, dan tujuan sesuai dengan Road Map Reformasi Birokrasi dan menjaga pelaksanaan Pembangunan dan penegakan Zona Integritas agas

berkelanjutan;

6. Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM kepada Sekretaris Jenderal KPU RI secara berkala/periodic dan berkesinambungan;

II. Tim Pelaksana, terdiri atas;

A. Tim Manajemen Perubahan

1. Mendorong komitmen pimpinan dan pegawai untuk melaksanakan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM;
2. Mendorong secara sistematis untuk konsistensi mekanisme kerja, Pembentukan pola pikir (mind set), budaya kerja (culture set) individu dan kelompok menjadi lebih baik sesuai dengan sasaran dan tujuan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM;
3. Memberikan dorongan untuk mengurangi risiko kegagalan yang disebabkan oleh kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan;
4. Menyusun dokumen secara pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM dengan memuat target prioritas kerja yang relevan dan akuntabel;
5. Melakukan sosialisasi internal dan/atau mengkampanyekan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM secara terus menerus;
6. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas khususnya dalam hal konsistensi mekanisme kerja, pola pikir, dan budaya kerja yang baik dilingkungan KPU Kabupaten Buton Tengah;

B. Tim Penataan Tata Laksana

1. Memberikan dorongan dan dukungan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas system, proses dan prosedur kerja yang jelas efisien, efektif dan terukur dalam Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM;
2. Mengkoordinasikan penyiapan dokumen Prosedur Operasional Tetap (SOP) Kegiatan Utama dan peta proses bisnis instansi (core business);
3. Mengkoordinasikan Pembangunan dan pengembangan e-Office;
4. Mendorong penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan manajemen kepegawaian, pengukuran kinerja, dan pelayanan publik di lingkungan KPU Kabupaten Buton Tengah yang mengedepankan Pembangunan dan penegakan Zona Integritas;
5. Meningkatkan kinerja dan tata laksana di Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM;

C. Tim Penataan Sistem Manajemen SDM:

1. Melaksanakan perencanaan kebutuhan pegawai sesuai kebutuhan, beban kerja, dan/atau formasi yang ditetapkan;
2. Melaksanakan system rekrutmen pegawai yang terbuka, transparan, akuntabel dan berbasis kompetensi;
3. Mendorong terciptanya ketaatan, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur / pegawai dalam Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM;
4. Mendorong penegakan profesionalitas, dan akuntabilitas,



dan disiplin aparat/pegawai di Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM;

5. Mendorong pola mutasi internal pegawai secara terukur dan terbuka;
  6. Melakukan Upaya pengembangan kompetensi pegawai (capacity building/tranfer knoeledge) melalui system atau pola yang efektif dan kesempatan mengikuti proses Pendidikan dan pelatihan secara adil, terukur dan terbuka;
  7. Melakukan penyusunan penerapan system penilaian kinerja individu secara periodik , akuntabel dan berkesesuaian;
  8. Mendorong penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai secara berkala dan berkesinambungan;
  9. Mendorong penerapan dan pemanfaatan system informasi kepegawaian untuk mewujudkan pelaporan dan penyajian informasi kepegawaian yang mutakhir dan andal.
- D. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja:
1. Mendorong keterlibatan pimpinan secara langsung dalam penyelenggaraan siste akuntabilitas kinerja Lembaga KPU Kabupaten Buton Tengah;
  2. Melakukan penyusunan dokumen perencanaan strategis (renstra) dengan, meperhatikan kondisi satuan kerja, SDM yang dimiliki, strategis pencapaian atau rencana tersebut, dan ukuran keberhasilan atau rencana yang berorientasi pada hasil;
  3. Menyusun indikator kinerja utama (IKU) yang memiliki kriteria SMART (specific, measureable, archeivable, relevant and time bound);
  4. Mendorong peningkatan SDM yang menangani akuntabilitas kinerja;
  5. Menyusun laporan kinerja secara tepat waktu.
- E. Tim Penguatan Pengawasan;
1. Melakukan public campaign, menerapkan pengendalian dan penolakan terhadap gratifikasi di lingkungan KPU Kabupaten Buton Tengah;
  2. Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) secara rutin dan disiplin;
  3. Menyediakan dan memberikan akses layanan pengaduan Masyarakat dan whistle blowing system;
  4. Melakukan sosialisasi, identifikasi, mengimplementasikan, dan mengavaluasi penanganan benturan kepentingan dalam tugas dan fungsi utama masing-masing individu dilingkungan KPU Kabupaten Buton Tengah;
  5. Menyampaikan laporan harta kekayaan pribadi pegawai ASN/ Pejabat / Penyelenggara Negara (LHKP / LHKPN / LHKASN);
  6. Mendorong peningkatan peran aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai quality assurance dan consulting dalam pengawasan pelaksanaan keuangan, akuntabilitas dan kinerja.
- F. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik:
1. Menyusun kebijakan standar, maklumat pelayanan, SOP pelaksanaan standar pelayanan, dan melakukan reviu dan/atau perbaikan terhadap standar/SOP pelayanan public secara berkala;
  2. Melakukan sosialisasikan atau pelatihan berupa kode etik,

estetika, capacity building dalam Upaya penerapan budaya pelayanan prima;

3. Melaksanakan pelayanan public yang prima, terpadu, dan terintegrasi;
4. Menyediakan informasi tentang pelayanan public yang mudah diakses oleh Masyarakat dan dilakukan melalui berbagai media;
5. Menerapkan system reward and punishment bagi pelaksanaan layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan apabila layanan yang diperoleh tidak sesuai standar;
6. Melaksanakan survey kepuasan Masyarakat terhadap layanan public yang di berikan;
7. Melakukan publikasi dan menindaklanjuti hasil suevei kepuasan Masyarakat dalam rangka memperbaiki kualitas pelayanan public;
8. Melakukan inovasi pelayanan public untuk meningkatkan partisipasi Masyarakat dalam memanfaatkan pelayanan pada KPU Kabupaten Buton Tengah.

- KETIGA : Susunan Keanggotaan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi bersih dan Melayani sebagaimana di maksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEEMPAT : Masa tugas Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Koruosi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana di maksud dalam Diktum KESATU selama Tahun Anggaran 2025



KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melakukan koordinasikan internal dan bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah.

Ditetapkan di Labungkari  
Pada tanggal 3 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUTON TENGAH

LA ODE ABDUL JINANI

Salinan sesuai aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUTON TENGAH  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan  
Masyarakat





LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUTON TENGAH NOMOR 12 TAHUN  
2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU  
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH  
BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANIDI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUTON TENGAH TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU  
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN  
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUTON TENGAH TAHUN 2025

No	Nama	Jabatan	
		Struktural	Tim ZI (Zona Integritas)
(1)	(2)	(3)	(4)
I. TIM PENGARAH			
	1.	La Ode Abdul Jinani	Ketua KPU Kabupaten Buton Tengah Pengarah
	2.	Masurin	Anggota KPU Kabupaten Buton Tengah Pengarah
	3.	Darwin	Anggota kpu Kabupaten Buton Tengah Pengarah
	4.	La Zaula	Anggota KPU Kabupaten Buton Tengah Pengarah
	5.	Karlianus Poasa	Anggota KPU Kabupaten Buton Tengah Pengarah
II. TIM PELAKSANA			
	1.	Andi Agusaling	Sekretaris KPU Kabupaten Buton Tengah Ketua Tim Pelaksana
	2.	Syahrn	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum Sekretaris Tim Pelaksana
A. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
	1.	Andi Agusaling	Sekretaris KPU Kabupaten Buton Tengah Koordinator Merangkap Anggota
	2.	Syahrn	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, dan Hukum Anggota
	3.	Syahrul	Kepala Subbagian Parmas dan SDM Anggota

	4.	Rasiun Naefu	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
	5.	Hendra Gapur Jufri	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
	<b>B. TIM PENATA TATALAKSANA</b>			
	1.	Rasiun Naefu	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator Merangkap Anggota
	2.	Sitt Risda	Staf Pelaksana	Anggota
	3.	Andi Khairul Baits Said	Staf Pelaksana	Anggota
	4.	Nanang Kosim	Staf Pelaksana	Anggota
	5.	L.M Ma'riap Saba	Staf Pelaksana	Anggota
	<b>C. TIM PENATAAN SISTIM MANAJEMEN SDM</b>			
	1.	Syahrul	Kepala Subbagian Parmas dan Sumber Daya Manusia	Koordinator Merangkap Anggota
	2.	La Atnan	Staf Pelaksana	Anggota
	3.	Alva Reza Febrian	Staf Pelaksana	Anggota
	4.	Rifan Cahyadi	Staf Pelaksana	Anggota
	5.	Nani Tanjriani	Staf Pelaksana	Anggota
	<b>D. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA</b>			
	1.	Rasiun Naefu	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator Merangkap Anggota
	2.	Risda	Staf Pelaksana	Anggota
	3.	Andi Khairul Baits Said	Staf Pelaksana	Anggota
	4.	Nanang Kosim	Staf Pelaksana	Anggota
	5.	L.M Ma'riap Saba	Staf Pelaksana	Anggota
	<b>E. TIM PENGUATAN PENGAWASAN</b>			
	1.	Syahrul	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator Merangkap Anggota
	2.	Pekra Mardi Pongrekun	Staf Pelaksana	Anggota
	3.	Eko Suhardiono Prasetyo	Staf Pelaksana	Anggota
	4.	Wa Ode Nurwasda	Staf Pelaksana	Anggota
	5.	Nasir	Staf Pelaksana	Anggota
	<b>F. TIM PENGUATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK</b>			
	1.	Hendra Gapur Jufri	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator Merangkap Anggota



2.	Erna Dian	Staf Pelaksana	Anggota
3.	Muhammad Kabir Sana	Staf Pelaksana	Anggota
4.	Dini Fadilah	Staf Pelaksana	Anggota
5.	Iskandar	Staf Pelaksana	Anggota

Ditetapkan di Labungkari  
Pada tanggal 3 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUTON TENGAH

LA ODE ABDUL JINANI

Salinan sesuai aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUTON TENGAH  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilihan dan Hukum.

